

LAPORAN EVALUASI KINERJA BIDANG PERTANAHAN TRIWULAN I TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan anggaran daerah kepada berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat. Evaluasi ini mencakup capaian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode Januari hingga Maret 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap segala saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD serta sebagai dasar pengambilan kebijakan pada triwulan berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, khususnya kepada tim evaluasi, perangkat daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya

Mallu, 05 April 2025

**KEPALA BIDANG
PERTANAHAN,**



INDRA WIJAYA, S.H

Pangkat : Pembina. IV/a

NIP. 197808022008031001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. RENCANA STRATEGIS.....	5
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur	10
3.2. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat	10
3.3. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Komposisi SDM Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin	3
2.	Komposisi SDM Sekretariat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025	4
3.	Komposisi SDM Sekretariat Jenjang Eselon Tahun 2024	4
4.	Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur	6
5.	Program untuk Pencapaian Sasaran Sekretariat Tahun 2025 DPKPP Kabupaten Luwu Timur	8
6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Triwulan I Tahun 2025	10
7.	Target dan Realisasi Bidang Pertanahan Triwulan I Tahun 2025	15
8.	Capaian Program Pendukung Sasaran II	19
9.	Realisasi Anggaran Bidang Pertanahan Triwulan I Tahun 2025	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai perjalanan suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan I DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

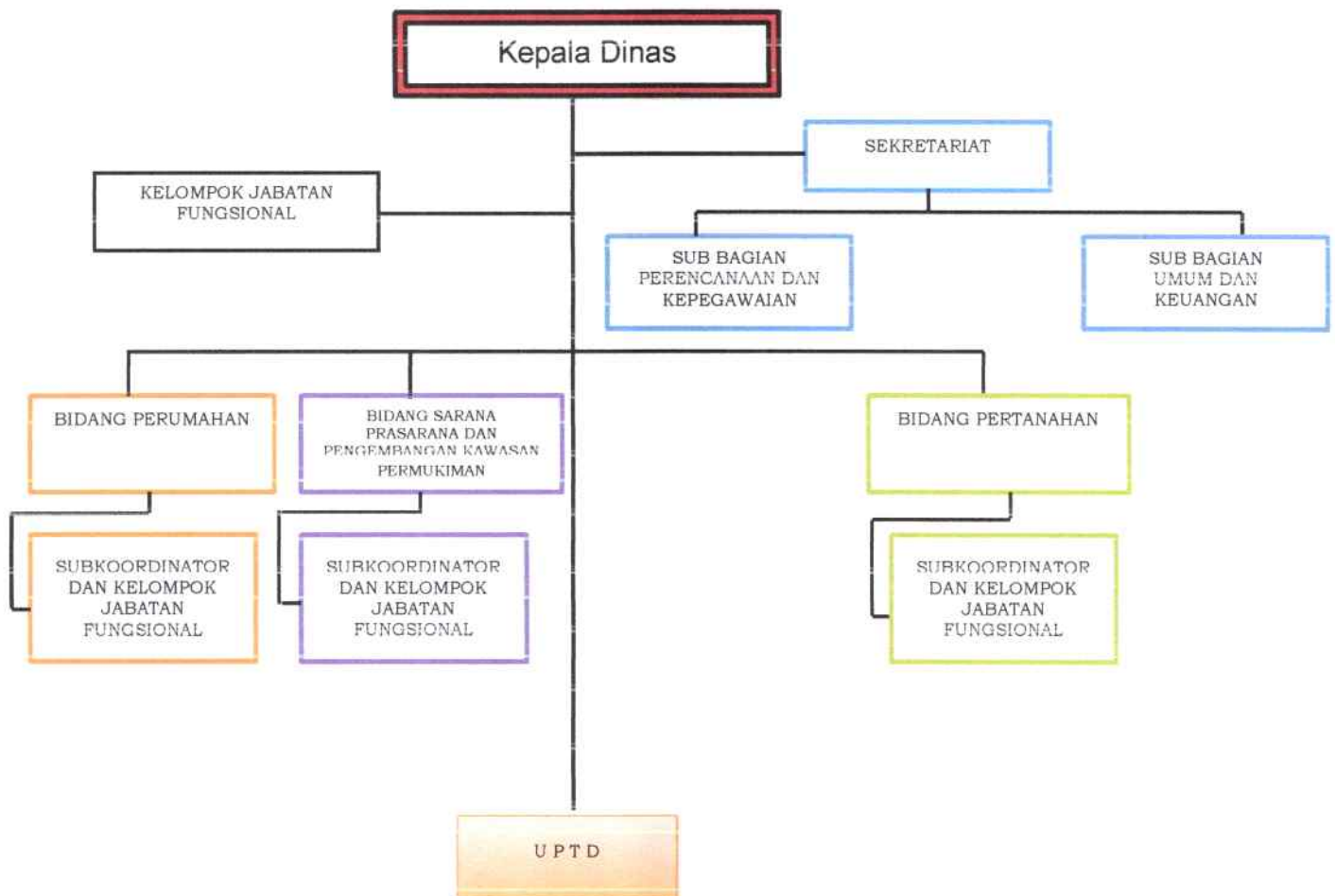
Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan I DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabuapten Luwu Timur di bidang pertanahan, yaitu merumuskan kebijakan teknis di pertanahan.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2024 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1

Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	17	4	21

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2024 sebanyak 21 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki

sebanyak 17 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 4 orang.

Tabel 2
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	-	17	1	-	-	3	21

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada triwulan I tahun 2024, berdasarkan jenjang pendidikan, S1 sebanyak 17 orang, D3 1 orang, SMA sebanyak 3 orang.

TABEL 3
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2024

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	-	3
4	IV a	-	2	2
Total		5	2	7

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari eselon II/a sebanyak 1 orang, eselon III/a sebanyak 1 orang eselon III/b sebanyak 3 orang dan eselon IV/a sebanyak 2 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan misi ke-3 (M3), Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang Berkualitas (M3);
2. Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP di bidang pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;

Tabel 4
Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Bidang Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah(%)</i>	100

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut.

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program di bidang pertanahan untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3. Pengelolaan Tanah Kosong 4. Pengelolaan Izin Membuka Tanah 5. Penatagunaan Tanah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan I Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan I

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan I Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang pertanahan triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	0	0

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 8

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95	0	0

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran II memiliki indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “ luasan tanah yang dimanfaatkan/luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator sasaran II adalah 95%, belum ada realisasi, hal ini dikarenakan variable yang digunakan untuk menghitung capaian target belum tercapai. Rencana aksi untuk mendukung sasaran II adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengamanan dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II yaitu :

✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

✚ Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah

Kabupaten/Kota

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan persertifikatan aset Desa;
- ✚ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- ✚ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;
- ✚ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

2. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target Realisasi Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum						Target
Indikator	Triwulan Sebelumnya			Triwulan I			Tahun
Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	2025 (%)
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	95%

Berdasarkan tabel di atas belum dapat dijelaskan untuk capaian triwulan I, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada triwulan I, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran II jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan I	Rata-rata realisasi sampai dengan Tahun 2024	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	0	0	95,00

1. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran I

+ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2025, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN (Persero) Unit Kebun Malili, dan Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk yang diantaranya masuk tercatat sebagai aset tanah Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur yang akan disertifikatkan serta rencana pelepasan HGB PT. Vale Ind, Tbk disekitar area Kantor Camat Nuha Desa Sorowako.

Tabel 10

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN	KET
					I	II	III	IV	I	I	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar	3 Kasus	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	3 acara	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun n dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- i. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertaahun pada tahun n (m²). Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
 - a. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Desa Wewangriu Kecamatan Malili, yaitu sementara proses kelengkapan berkas untuk prmbayaran tahap II.

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata
- a. Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Aksi pada triwulan I yaitu proses perencanaan administrasi pada aplikasi SIRUP, untuk pelacakan titik persil pengadaan patok dan papan pengumuman.

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk

penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

- a. Subkegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan II, sehingga pada triwulan I belum ada capaian kinerja.

+ Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

- i. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten. Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Sementara menunggu data aset tanah Pemda yang belum memiliki sertifikat di bidang Aset.

Tabel 11

Capaian Kegiatan/Subkegiatan Sasaran I

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN	KET
					I	II	III	IV	I	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100%	0	25%	25%	25%	25%	0	0	
	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar	3 kasus	0	25%	25%	25%	25%	0	0	
	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	3 berita acara	0	25%	25%	25%	25%	0	0	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100%	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	10000 m2	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN	KET
					I	II	III	IV	I	I	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
3	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda	100%	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi	4 laporan	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana	20 bidang	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
4	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi	100%	0%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin lokasi yang terdaftar	2 Izin	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	3 dokumen	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	60,81 %	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	100%	0	25%	25%	25%	25%	0%	0%	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN	KET
					I	II	III	IV	I	I	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0	25%	25%	25%	25%	0	0	

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang pertanahan sebesar Rp. 2. 920.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) .Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 12
Realisasi Anggaran Triwulan I 2025
Bidang Pertanahan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN KAS TRIWULAN I	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
					(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	4.730.000	2.223.800	-	-	4.730.000	100
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus terdaftar (kasus)	3	4.730.000	2.223.800	-	-	4.730.000	100
Mediasi penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara hasil mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Berita acara)	3	4 730.000	2.223.800	-	-	4.730.000	100

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)	100	270.456.000	255.980.000	-	-	270.456.000	100
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n (m2)	100.000	270.456.000	255.980.000	-	-	270.456.000	100
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah keputusan Bupati/Wali kota tentang penetapan penerima santunan tanah (Dokumen)	3	270.456.000	255.980.000	-	-	270.456.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda (Persen)	1	88.904.000	19.710.000	-	-	88.904.000	100
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi (Bidang)	20	88.904.000	19.710.000	-	-	88.904.000	100
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	88.904.000	19.710.000	-	-	88.904.000	100

	yang diinventarisasi (Laporan)							
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi (Persen)	1	5.080.000	1.566.000	-	-	5.080.000	100
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	2	5.080.000	1.566.000	-	-	5.080.000	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara (Dokumen)	3	5.080.000	1.566.000	-	-	5.080.000	100
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (Persen)	100	64.000.000	15.269.400	2.920.000	19,12	61.080.000	95
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (Persen)	100	64.000.000	15.269.400	2.920.000	19,12	61.080.000	95
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	64.000.000	15.269.400	2.920.000	19,12	61.080.000	95

BAB IV PENUTUP

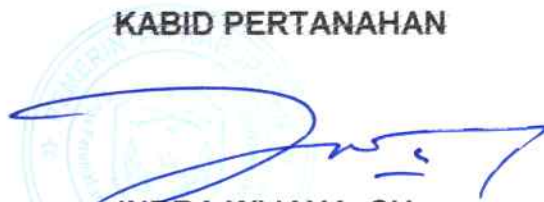
Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang pertanahan pada Triwulan I Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP bidang pertanahan Kabupaten Luwu Timur triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan I Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 30 April 2025

KABID PERTANAHAN



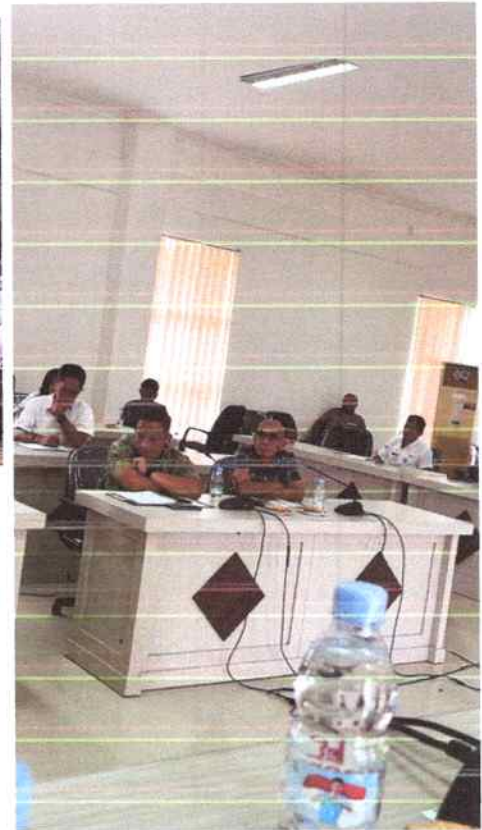
INDRA WIJAYA, SH

Pangkat : Pembina

NIP : 19780802 200803 1 001

Lampiran
Dokumentasi Pendukung Sasaran II

**1. Permohonan pengembalian Hak-hak masyarakat yang di klaim oleh PTPN
(Persero) Unit Kebun Malili**



2. Penyamaan Persepsi dan pandangan terhadap wilayah konsesi/kontrak Karya/IUP – K PT.Vale Ind, Tbk.

